

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diawali dengan pengesahan UU No. 22 thn 1999 yang membahas tentang “Pemerintah Daerah” serta UU No. 25 thn 1999 yang membahas tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” yang kemudian dilakukan penyempurnaan menjadi UU No. 32 dan UU No. 33 thn 2004. Menurut UU No. 32 thn 2004 otonomi daerah ialah hak dan kewajiban termasuk wewenang daerah otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya beserta kepentingan masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan desentralisasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk dapat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Fauzi, 2018).

Penyerahan kewenangan tersebut menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Desa diberikan kuasa penuh untuk mengatur serta mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari siapapun, tentunya dengan mengandalkan berbagai sumber daya yang ada di desa tersebut. Pemerintah desa sebagai instansi terkecil yang telah diberi wewenang penuh juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangannya sesuai dengan tupoksi yang telah dibahas bersama dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa (Sulfiyah, 2018). Salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah desa ialah mengelola keuangan desa secara

transparan, dapat dipertanggungjawabkan, juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya (Hasliani & Yusuf, 2021).

Panduan dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa laporan keuangan desa dimaksudkan sebagai buktipertanggungjawaban kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka informasi yang tersaji dalam laporan keuangan desa harus berkualitas agar dapat dipertanggungjawabkan terhadap pemegang kepentingan. Hasil dari laporan keuangan yang berkualitas tersebut dijadikan sebagai tolok ukur suatu instansi sudah berjalan dengan baik. Menurut Kieso *et al.* (2003:72) tujuan dilakukannya penyusunan laporan keuangan ialah agar dapat memberikan informasi keuangan selama satu periode akuntansi bagi pihak yang berkepentingan.

Kualitas laporan keuangan desa dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ialah penggunaan sistem keuangan desa (Atikah, 2019). Pemerintah bersama dengan BPKP mengembangkan aplikasi siskeudes sebagai aplikasi tata kelola keuangan desa diharapkan dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2019) menyatakan dengan tingginya intensitas penggunaan siskeudes maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

Selain siskeudes diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan desa menurut Aprilianti *et al.* (2021) kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Seseorang dikatakan mempunyai kompetensi dapat

dilihat melalui penguasaan pengetahuan serta kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya (Atikah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Hamanay (2022) dan Zuhroh (2021) menyimpulkan bahwa dengan adanya kompetensi manusia yang kompeten akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan desa ialah sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dalam PP No. 60 tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses yang dirancang agar dapat memberikan keyakinan yang maksimal untuk mencapai efektivitas, efesiensi, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi ditunjukkan untuk dapat mencegah juga mendeteksi akan adanya kecurangan dan salah saji dalam proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian Atikah (2019) dan Erawati & Hamanay (2022) sistem pengendalian yang baik mencerminkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, salah satu yang menjadi tanggung jawab desa ialah untuk mengelola keuangan desa secara transparan (Hasliani & Yusuf, 2021). Menurut Erawati & Hamanay (2022) menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Salah satu faktor laporan keuangan dikatakan berkualitas ialah dapat dipahami oleh penggunanya sehingga untuk dapat dipahami pengguna, laporan keuangan desa harus dapat diakses secara terbuka terkait informasi-informasi keuangan desa.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan desa ialah pemanfaatan teknologi informasi, menurut Ridzal *et al.* (2022) teknologi informasi dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. PP No. 56 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 65 tahun 2010 mewajibkan tiap organisasi pemerintah baik pusat ataupun daerah agar memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang berkualitas, sejalan dengan hal tersebut penelitian terkait pemanfaatan teknologi informasi telah diteliti oleh Aprilianti *et al.* (2021), Kusnadi *et al.* (2022), dan Hendaris & Romli (2021) menyatakan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan desa ialah pengalaman kerja, menurut Sukriani (2018) lamanya masa kerja seseorang di bagian pemerintahan, akan membuatnya menjadi lebih berpengalaman dan dapat meminimalisir kesalahan saat bekerja. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atika (2019) yang menunjukkan dengan adanya pengalaman kerja pada saat menyusun laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berkualitasnya laporan keuangan juga dipengaruhi kemampuan pimpinan organisasinya (Uleng, 2019). Pemimpin yang baik harus memiliki gaya kepemimpinan yang mampu memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Agung & Gayatri, 2018). Beberapa Kepala Daerah mampu memimpin daerahnya dengan gaya kepemimpinan mereka masing-masing sehingga mengantarkan daerahnya menjadi lebih maju. Kemampuan dari pemimpin dalam memimpin suatu organisasi sektor publik menjadi salah satu hal yang menjadikan

pegawai atau bawahan memaksimalkan kinerjanya agar menghasilkan suatu informasi bagi masyarakat berupa laporan keuangan yang informatif dan berkualitas. Della (2020), Iriyadi & Yadiati (2017) serta Mardinan *et al.* (2018) membuktikan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Diani (2015) salah satu cara untuk mengetahui laporan keuangan yang dibuat apakah sesuai dengan SAP dan telah memenuhi kualitas yang diharapkan, bisa dilihat melalui opini auditor. Pemerintah Kabupaten Bangkalan berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun berturut-turut.

Gambar 1. 1



Sumber : jatim.bpk.go.id

Namun, opini mengenai “kewajaran” bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya. Berkaitan dengan salah satu karakteristik laporan keuangan yaitu andal, masih banyaknya ditemukan penyelewengan dana desa di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, diantaranya kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) di Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh perangkat desa yang kerugiannya mencapai

Rp 587.000.000. Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan ialah salah satu barang bukti yang disita yaitu laporan pertanggungjawaban DD dan APBDes Desa Karang Gayam tahun 2016 (Taufiqurrahman 2019, 20 Januari).

Kasus selanjutnya terdapat Camat dan Kepala Desa (Kades) Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 yang kerugiannya mencapai Rp 700.000.000 (Taufiqurrahman 2022, 11 Mei).

Fenomena terakhir adalah kasus korupsi dana desa dan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di desa kelbung kecamatan galis kabupaten bangkalan yang dilakukan oleh aparatur desa dengan modus mengambil kartu PKH milik 300 warga, adapun kerugian mencapai lebih dari dua miliar rupiah yang mereka ambil dari 300 penerima PKH (Kamaludin 2021, 16 Desember).

Topik kualitas laporan keuangan desa telah banyak menarik minat akademisi untuk diteliti, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian serta variabel penelitian yang digunakan. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan memiliki 18 kecamatan dan 273 desa (bangkalankab.go.id).

Perbedaan variabel yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini memakai semua variabel yang berpengaruh positif hasil dari penelitian sebelumnya. Berkenaan dengan itu, pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menguji pengaruh variabel-variabel tersebut apakah tetap berpengaruh positif jika diuji terhadap kualitas laporan keuangan desa terkhusus pada wilayah desa di Kabupaten Bangkalan. Dari apa yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANGKALAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Siskeudes berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- 2) Apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- 4) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- 5) Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- 6) Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- 7) Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan desa

- 3) Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 4) Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 5) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 6) Untuk menguji secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 7) Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan desa

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Membuktikan secara teoritis bahwa berdasarkan *stewardship theory* menuntut *stewards* agar mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas kepada *principal*. Penelitian ini juga memberikan tambahan literatur terkait faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. siskeudes, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja, serta gaya kepemimpinan adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa agar lebih selektif dalam menjalankan tugasnya terkait penyusunan laporan keuangan desa khususnya pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa yaitu: Sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi,

pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan, serta dengan adanya hasil penelitian ini pemerintah desa lebih terdorong untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan desa.